

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

- Abdulgani, Roeslan.dkk. 1999. *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Yayasan Widya Patria.
- Ali Safa'at, Muchamad. 2011. *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Alrasid, Harun. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti.
- Amal, Ichlasul. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik dalam Abdul Mukhtie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Asshidiqie, Jimly. 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Poltik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Konstitusi Press.
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azra, Azumardi. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Bangun, Zakaria. 2008. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis.
- Budiardjo, Miriam. 2000, *Sistem Pemilu Yang Bagaimana? Alam Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____. 2003. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin. 2003. *Demokrasi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan*. Jakarta: Sinar Baru.
- Danadireksa, Hendarmin. 2008. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Jakarta: Fokusmedia.
- Erfandi. 2014. *Parliamentary Threshold dan Ham dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Revita aditama.

- Handoyo, Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2015. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Kencana.
- Huntington, Samuel P. 2001, *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta : Pustaka Grafiti.
- Husein, Harun. 2011. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka dan Analisis*. Jakarta: Rumah Pemilu.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, M. Rusli. 1998. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mashad, Dhurorudin. 1999. *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca-Orba Baru*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M.D, Moh. Mahfud. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- _____. 2004. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi,
- M. Ghaffar, Janedri. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih. 2000. *Ilmu Negara*. Edisi Revisi. Cetakan Keempat. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 2001. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ranadireksa, Hendarmin. 2008. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokusmedia.
- Reynolds, Andrew. 2005. *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Terjemahan oleh Noor Cholis, Jakarta: Perludem.

- Riyanto, Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung: YAPEMDO.
- Soehino, 2010. *Hukum Tata Negara “Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia”*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sukarna. 1991. *Sistem Politik*. Bandung: Alumni.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ubaidillah, A. dan Ahmad Rozak. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah.

SUMBER INTERNET & JURNAL

Abdul Latif. 2011. *Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multi Partai*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3, April 2011

Dewa Made Putra Wijaya. “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, Jurnal Yuridis, Vol. II Nomor 6 Desember 2014.

Didik Sukriono. “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi, Volume 1, Juli 2010, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Mardian Wibowo. “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015.

Miriam Budiardjo. *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10 Jakarta: 2001.

Janpatar Simamora. “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”, Jurnal *Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014.

Jimly Asshidiqie. *Dinamika Partai Politik Dan Demokrasi*, diunduh dari www.jimly.com, diakses tanggal 28 Oktober 2017.

Lutfil Ansori. “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 1, Juni 2017.

Syamsuddin Haris. “Salah Kaprah Presidential Threshold”, <http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold-1351561633>, diakses pada 22 April 2018

WordReference.com, Kamus Bahasa Inggris, <http://translate.google.co.id/trasnlte?hl=id&langpair=http://www.wordreference.com/definition/implication>, diakses tanggal 10 Oktober 2017 pukul 17.30

Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaIndonesia.org/implikasi>, diakses tanggal 10 Oktober 2017 pukul 17.35

Jimly Asshiddiqie 2013, *Dinamika Partai Poltik Dan Demokrasi*, diunduh dari www.jimly.com, diakses tanggal 12 Oktober 2017.

<https://kpud-balangankab.go.id/pemilu-presiden-tahun-2004/> diakses pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 13.45

<https://nasional.kompas.com/read/2008/07/07/23212471/daftar.parpol.peserta.pemilu.2009> diakses pada tanggal 10 April 2018 pukul 15.43

Kumparan, “5 Argumentasi Mendagri PT Hasil Pileg 2014 Bisa Dipakai Pilpres 2019”, <https://kumparan.com/muhamad-iqbal/5-argumentasi-mendagri-pt-hasil-pileg-2014-bisa-dipakai-pilpres-2019> diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 18.54.

http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/07/Laporan-Ketua-Pansus-dalam-Rapat-Paripurna-DPR-20-Juli-2017_REVISI-2300-wib.pdf Diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 19.38

RUU Pemilu Disahkan Aklamasi oleh Enam Fraksi, diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17018/t/RUU+Pemilu+Disahkan+Aklamasi+oleh+Enam+Fraksi> pada tanggal 22 April 2018 pukul 14.43

NORMA HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 6109.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 5189.

Mahkamah Konstitusi, Putusan No.51-52-59/PUU-VI/2008 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi, Putusan No.14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 53/PUU-XV/2017” dalam Perkara Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945.